

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI KOTA BLITAR**

(Studi Pada Dinas Penanaman modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu)

SKRIPSI



KURNIAWAN SAPUTRO

201210050311099

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Blitar”. Skripsi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis untuk mendapatkan gelar strata S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya, atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis masih jauh dari sempurna sehingga semua ini tidak akan memberikan hasil memuaskan apabila tidak ada bantuan serta bimbingan dari pihak lain. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pernyataan.....	ii
Abstraksi.....	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Deinisi Konseptual.....	8
a. Implementasi Kebijakan.....	9
b. Pelayanan Publik.....	9
c. IMB.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Subyek Penelitian.....	14
5. Lokasi Penelitian.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Implementasi Kebijakan	18
1. Konsep Implementasi.....	18
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	20
2.1.Penelitian Terdahulu.....	24
B. Pelayanan Publik	25
1. Konsep Pelayanan Publik.....	25
2. Pelayanan Umum.....	27
2.2 . Bentuk dan Sifat Pelayanan.....	28

3. Bentuk Pokok Pelayanan Publik	31
4. Standar Pelayanan Publik.....	32
5. Faktor Pendukung Pelayanan Publik	33
6. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik	33
7. Pelayanan Publik Sebagai Pemberi Jasa	36
8. Perijinan Terpadu.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Profil Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.....	40
1. Sejarah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.....	40
3.1. Gambar KP2T Kota Blitar.....	44
B. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.....	4
1. Visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	44
2. Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.....	45
C. Tupoksi dan Fungsi dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	46
D. Susunan Organisasi dan Bagian Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu.....	50
3.2. Gambar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Kebijakan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Blitar	56
1. Prosedur Pelayanan Ijin Medirikan Bangunan.....	56
4.1. Gambar Kotak Saran	58
4.2. Gambar <i>Customer Service</i> Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.....	59
4.3. Gambar Banner Tentang Jasa Perijinan yang ada di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Blitar.....	60
2. Biaya Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.....	60
3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Blitar.....	64

4.4. Gambar Wawancara Kassubag Kantor.....	66
4. Sistem Pelayanan IjinMendirikan Bangunan di Kota Blitar.....	68
Gambar Alur Proses Perijinan Pelayanan Terpadu Kota BLitar.....	69
Peta Denah Wilayah –wilayah Ijin Mendirikan Bangunan Kota Blitar.....	72
B. Kendala Pemerintah Kota Blitar dalam Implementasi Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan.....	72
1. Masyarakat Kurang Memahami Atas Pentingnya Memiliki IMB.....	72
4.5.Gambar Kurangnya Pegawai di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.....	76
2. Masyarakat Kurang Mengetahui Informasi dan Langkah-Langkah untuk Mengurus IMB.....	76
4.6 Gambar Denah Lokasi Syarat Pengurusan IMB.....	78
3. SDM Masyarakat.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab, Solichin, 2011, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implemtasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press

Ardani, Tritiadi A.2004. *Obeservasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia

Boediono, B.2003. *Pelayanan prima Perpajakan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal.60

Bungin, M. Burhan. 2008 *Peneltian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana

Dwiyanto, Agus, 1999, *Evaluasi Programdan Kebijaksanaan pemerintah, Pelatihan dan Teknik Manajemen Kebijakan Publik*, Angkatan II, UGM, Yogyakarta

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007

Ibid

Lemlit Unpad. Hal. 28

Marzuki, Ismail. 2015. *Skripsi "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kab Gresik"*. Ilmu Pemerintahan:UMM Hal.15

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hlm:12

Saefullah, H.A. Djadja.2008. *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. Bandung: AIPI dan PK2W

Soehartono, Irawan. 2002. *Metode penelitian sosial*. Bandung: hlm:35

Saleh, Muafik.2010. *Public Service Communication*. Malang.UMM Press. Hal.24
Siagian.2001. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bina Aksara. Hal.128-129
Salusu J, 1998, *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, PT. Grasindo, Jakarta

Thompson, Arthur A Jr and Stricland III.AJ, 1992, *Strategic Management Concept and Causes*, Boston : Irwin

Thoha, Miftah.1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali. Hal. 176-177
Tim dosen bahasa Indonesia UMM, 2003. *Bahasa Indonesia untuk karangan ilmiah*, UMM press, Malang, Halaman 207

Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume6 No.4, Sage, Beverly Hills

Jurnal :

De Jong, J & Hartog, D D, *Leadership as a determinant of innovative behaviour.A Conceptual framework*.2003. diakses dari <http://www.eim.net/pdf-ez/H200303.pdf>.

Konsideran :

Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-23-tahun-2014-4893

Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-28-tahun-2002-2056

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006
Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang *Visi dan Misi* Dinas Penanaman m Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Internet :

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-28-tahun-2002-2056>

<http://fia-ub.blogspot.co.id/2015/11/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan.html>

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html>

